



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

———— **HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H** ————



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330

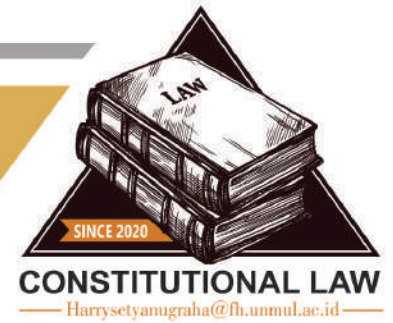
TEKNIK MENULIS JUDUL PER-UU-AN

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330

Bentuk Rancangan Per-UU-an



Peraturan Per-Uuan Baru

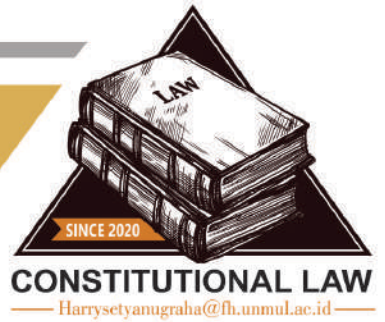
Peraturan Per-Uuan Perubahan

Peraturan Per-Uuan Pencabutan

Peraturan Per-Uuan Penetapan Perppu

Peraturan Per-Uuan Pengesahan Perjanjian Internasional

Komponen Pembentuk Judul



Jenis Per-UUan

Nomor Per-Uuan

Tahun Per-Uuan

Nama Per-Uuan

Ketentuan Dalam Penulisan Judul



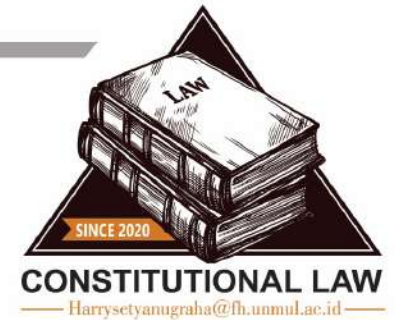
1. Judul Peraturan Perundang–undangan memuat keterangan mengenai: jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang–undangan.
2. Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang–undangan.
 - Contoh dengan 1 kata : Paten; Yayasan; Ketenagakerjaan; Keimigrasian
 - Contoh frasa : Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Program Pembentukan Peraturan Daerah
3. Judul Peraturan Perundang–undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KEIMIGRASIAN

JENIS
NOMOR DAN TAHUN
NAMA PUU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

4. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.



CONTOH SALAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)



Bagaimana jika yang kita buat adalah
Rancangan Undang-undang?

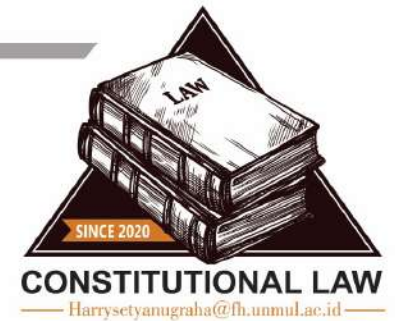
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
KEIMIGRASIAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Tugas anda sekarang, buatlah satu Judul RUU
dan satu Judul Raperda Provinsi!

Bagaimana jika yang anda buat adalah RUU
Perubahan?

5. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa “**perubahan atas**” di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.



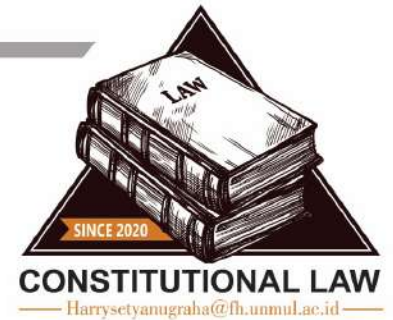
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG PARTAI POLITIK



6. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata “**perubahan**” dan kata “**atas**” disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAH DAERAH



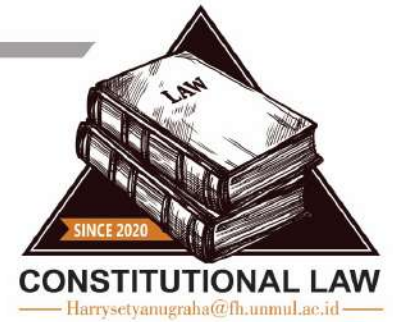
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KE-2 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004



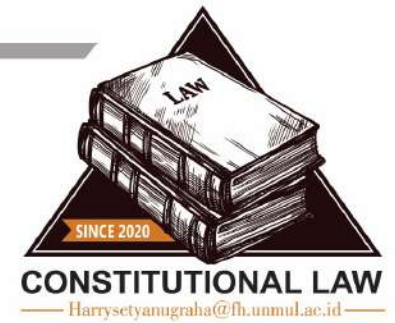
Tugas anda sekarang, buatlah satu Judul RUU Perubahan dan RUU Perubahan yang telah dilakukan lebih dari satu kali!

Bagaimana jika yang anda buat adalah RUU
Pencabutan?

7. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata “**pencabutan**” di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.



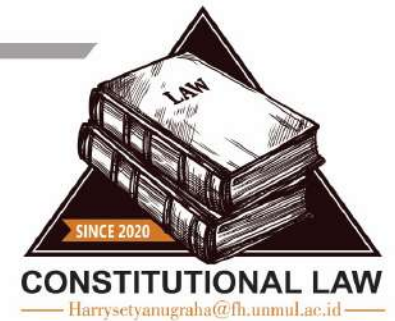
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



8. Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang–Undang, ditambahkan kata “**penetapan**” di depan judul Peraturan Perundang–undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.

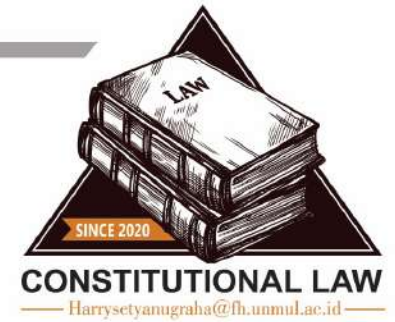
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG–
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG–UNDANG

8. Pada nama Peraturan Pemerintah Perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan. Jika Bahasa Indonesia dijadikan teks resmi:



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION*)

9. Jika Bahasa Indonesia tidak dijadikan teks resmi:



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*

(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG
TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

TERIMAKASIH

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330